

Memperjelas Sosok yang Samar*

Sebuah Pengantar

Oleh Ariel Heryanto

Demam perbincangan "kelas menengah Indonesia" sejak tahun 1970-an mengingatkan kita akan demam perbincangan "nasion Indonesia" di tanah jajahan Hindia Belanda sejak awal abad ini.

Bukan saja yang berbincang sama-sama kaum terpelajar (tepatnya 'tersekolah') yang hidup di kota. Banyak kemiripan lain. Kedua kaum itu memperbincangkan sebuah konsep yang relatif baru dan mengasyikkan. Kedua konsep diambil-alih dari masyarakat Barat, tentu saja dengan kewenangan mengubah makna aslinya. Kedua konsep mengacu pada suatu batasan komunitas modern. Keduanya dibicarakan oleh komunitas yang sama dengan yang diacu oleh konsep yang dibicarakan. Kedua konsep membantu komunitas yang membicarakan/dibicarakan me-redefinisikan identitas sosialnya.

Pada awalnya dua konsep itu diartikan berbeda-beda dan sering membingungkan. Membicarakan keduanya membutuhkan banyak angan-angan, walau si pembicara merasa sedang membicarakan sesuatu yang seakan-akan sudah hadir secara kongkret-objektif-empiris. Wujud kedua komunitas itu lama kelamaan bisa terasa semakin jelas, bukan karena konsepnya makin diperjelas, tapi karena konsep itu sering dibicarakan. Membicarakan sebuah angan-angan bisa mewujudkan secara kongkret dan lahiriah sesuatu yang tadinya abstrak dan asing. Bahasa bukanlah sekadar alat untuk membicarakan realitas, tapi juga kekuatan pembentuk realitas.

* Penulis berterima kasih kepada Amrih Widodo, Harry Wibowo, Arief Budiman, Daniel Lev dan David Bourchier atas kritik dan komentar mereka pada naskah awal tulisan ini.

Pada umumnya kelas menengah dipahami sebagai komunitas lintas-nasion atau kosmopolitan, biarpun ada variasi sesuai dengan perbedaan tempat dalam pembagian kerja internasional. Mereka punya kesamaan selera berbahasa, berdandan, bersantap, berlibur, bercanda atau bekerja. Mereka saling bercampur-darah, menjadi ipar satu sama lain dengan kebangsaan dan warna kulit beraneka-ragam. Jika membicarakan nasion dalam bahasa-bahasa daerah para pribumi di tanah jajahan sudah sulit, akan lebih sulit membicarakan kelas menengah dalam bahasa keraton atau bahasa pasaran rakyat-jelata.

Di sini bedanya nasion dan kelas menengah sebagai topik perbincangan. Relatif lebih mudah bagi kelas menengah di Indonesia membicarakan kaumnya sendiri bersama kelas menengah dari luar Indonesia, ketimbang membicarakannya dengan kaum jelata sebangsa-setanah-air. Buku yang berada di hadapan Anda memberikan wadah dan bahan renungan tentang itu.

Buku ini sangat penting karena beberapa hal. *Pertama*, inilah buku pertama dan sementara ini satu-satunya, yang secara khusus membahas kelas menengah di Indonesia. Bisa dibayangkan buku ini akan menjadi acuan utama dalam pembahasan serupa dalam beberapa tahun mendatang.

Kedua, buku ini merekam kerja-keras sejumlah sarjana yang menggeluti persoalan kelas menengah di Indonesia dari berbagai segi. Secara keseluruhan isi buku ini mungkin kurang terpadu, karena ditulis banyak orang dengan wawasan berbeda. Tetapi setiap bab buku ini punya mutiara masing-masing. Gabungan antara pemikiran, perdebatan, data empiris dan pembahasan teoretis yang disajikan di sini belum utuh atau memberi kesimpulan akhir. Tapi gabungan ini merupakan salah satu puncak dalam khasanah intelektual yang kita miliki sementara ini. Buku ini menyajikan banyak pertanyaan penting yang tak terjawab. Tapi kita tahu dalam pergulatan ilmu, pertanyaan seringkali lebih penting dari pada jawaban yang bisa beraneka.

Ketiga, menggembirakan sekali buku ini datang dari Australia. Sudah cukup lama kajian tentang Indonesia berada di bawah bayang-bayang dominasi pusat-pusat kajian di Amerika Serikat. Tidak kebetulan, baru sesudah Australia menembus dominasi Amerika Serikat dalam kajian Indonesia kita jumpai sebuah seminar besar tentang kelas sosial di Indonesia yang membuatkan buku ini. Tentu saja pembedaan sarjana Amerika-Australia seperti itu tidak bersifat mutlak, seperti terbukti dalam pembahasan di bawah ini.

Apa yang dapat saya tawarkan untuk memenuhi permintaan

penerbit agar membuat sebuah "pengantar kritis" bagi buku yang sangat saya hargai ini? Setiap bab tersusun dengan baik dan mampu menjelaskan pokok permasalahan masing-masing. Kedua penyunting telah menulis pendahuluan yang jauh lebih baik daripada yang bisa saya tulis. Pemetaan persoalan yang disajikan dalam pendahuluan mereka, disertai daftar keterbatasan dan kekurangan lingkup bahasan dalam buku ini, merupakan salah satu bagian terbaik.

Moga-moga tidak mubazir jika saya mencoba menjelajahi lebih lanjut beberapa pertanyaan dan jawaban yang digumuli para penulis di sini. Pokok-pokok ini tidak semuanya menjadi pusat perhatian para penulis. Karena itu tujuan utama bahasan saya bukanlah mengkritik tulisan-tulisan mereka, kendatipun komentar saya bisa bernada kritis. Pokok-pokok persoalan ini saya angkat karena penting dalam usaha saya sendiri dalam menggulati topik yang serupa. Dalam upaya ini, saya mendapat banyak ilham dari sejumlah pemikir yang dalam banyak hal saling berbeda: Erik Olin Wright, Pierre Bourdieu, Immanuel Wallerstein, Ivan Szelenyi dan Alvin Gouldner. Perlu dicatat, pengantar ini saya susun tanpa berkesempatan melihat naskah terjemahannya. Saya hanya membaca naskah aslinya dalam bahasa Inggris.

Apa yang ingin saya kemukakan berkisar pada tiga tema umum. Dua di antaranya sudah disinggung Richard Tanter dan Ken Young dalam bab pendahuluan mereka. *Pertama*, mengenai kejelasan konseptual untuk "kelas menengah" dan landasan teoretisnya. *Kedua*, mengenai politik, ideologi dan gaya hidup kelompok ini. *Ketiga*, saya tergelitik mempersoalkan hubungan kekuasaan dalam pembahasan ilmiah tentang kelas menengah di Indonesia.

Penajaman Konsep dan Kerangka Teori

Seperti dikatakan Tanter dan Young, tidak semua penulis buku ini bersepakat tentang perlunya mempertajam konsep "kelas menengah". Perdebatan yang bisa diharapkan bukan adu-konsep. Tapi baru tukar pikiran tentang perlu-tidaknya adu-konsep itu. Saya sendiri menyetujui pendapat Richard Robison tentang perlunya ketajaman konseptual dan bangunan teori yang kokoh untuk memperdalam pembahasan tentang kelas menengah. Memang ini tidak mudah, tapi menunda atau menghindarinya hanya akan lebih menyulitkan diri di kemudian hari. Ini tidak berarti saya sependapat dengan Robison dalam pilihan konsep dan wawasan

teoretis yang dianutnya. Robison layak dihargai sebagai ahli tentang Indonesia yang paling berjasa dalam menyumbangkan pikiran teoretis dalam soal ini. Sesudah menegaskan ini, saya ingin mempersoalkan pandangan teoretis Robison tentang kelas menengah.

Sayang, Robison sendiri sebenarnya tidak mengajukan sebuah posisi konseptual atau teoretis terpadu yang bisa ditimbang-timbang, disetujui atau ditolak. Ia baru menabur sejumlah pertanyaan dengan bobot konseptual dan teoretis. Juga belum jelas benar apakah percikan pertanyaan Robison menegaskan corak "Marxis" seperti yang dikesangkan penulisnya dan terlebih-lebih dalam kecaman terhadapnya yang dilancarkan penulis lain.

Jika seorang Robison saja -- yang diakui banyak pihak sebagai orang yang berada di garis terdepan dalam pergumulan teori kelas sosial Indonesia mutakhir -- baru tampil pada tahap ragu-ragu demikian, bisa dibayangkan bagaimana kondisi kajian kita pada umumnya masa ini. Langkanya bahasan teori dalam buku ini merupakan sebuah petunjuk yang tak asing tentang miskinnya kajian teoretis dalam khasanah keilmuan kita di Indonesia maupun di kalangan para ahli Indonesia di luar negeri. Bukan tak ada individu-individu di Indonesia atau ahli asing tentang Indonesia yang menekuni pelik-pelik teori. Tanter dan Young saya kenal sebagai dua sarjana yang mendalami kajian-kajian teoretis. Tapi agaknya pendalaman teoretis belum mendapat cukup tempat dalam pranata keilmuan kita. Perbincangan ilmiah tentang kelas menengah Indonesia merupakan perbincangan dari-oleh-untuk ahli tentang Indonesia yang membahas kelas sosial ketimbang ahli tentang kelas sosial yang membahas Indonesia. Ini mungkin masih akan berlanjut untuk beberapa tahun mendatang.

Biarpun Robison hanya menebarkan sejumlah persoalan dan pertanyaan, uraiannya layak disimak baik-baik. Robison ingin memisahkan kelas kapitalis dari kelas menengah tetapi tidak menemukan lowongan yang pas untuk menempatkan kelas menengah dalam peta struktur kelas di Indonesia yang ada dalam benaknya. Maka dia mengambil jalan pintas. Karena penampilan kelas menengah di Indonesia (pejabat, manajer, profesional dan intelektual) dilihatnya kolot dan berpihak pada penguasa, Robison menyusupkan kelas menengah ini di sela-sela ketiak kelas atas "sebagai petugas-petugas politik, ekonomi, sosial dan perangkat ideologis bagi kapitalisme di negara ini."

Dalam uraiannya Robison berbicara seakan-akan di Indonesia

hanya ada satu struktur kelas sosial, yakni kapitalisme. Seakan-akan hanya ada satu tata-produksi. Dengan demikian dibayangkan hanya ada dua kelas sosial: kapitalis dan pekerja. Seperti ditulisnya sendiri, Robison menghadapi kesulitan konseptual. Ia tergoda menempatkan kelas menengah di salah satu dari dua kelas itu, tapi sadar hal ini tidak pas.

Sebuah pemetaan alternatif, biarpun sangat simplistik, layak dijelajahi untuk menghadapi kesulitan konseptual di atas. Misalnya sebuah pemetaan dengan skema yang mengakui (i) kebanyakan masyarakat mutakhir, termasuk Indonesia, mempunyai lebih dari satu tata-produksi; (ii) biasanya ada salah satu tata-produksi yang menonjol dan menguasai tata-produksi yang lain; (iii) setiap tata-produksi hanya menghasilkan dua kelompok "kelas" sosial, yakni yang berkuasa (atas) dan yang dikuasai (bawah) -- maka dalam satu masyarakat ada sejumlah pasangan kelas berkuasa/ dikuasai atau atas/bawah; (iv) ada kelas atas dari tata-produksi yang dominan dan kelas atas dari tata-produksi yang tidak-dominan.

Jika skema pemetaan seperti ini dapat diterima, maka kelas menengah dapat dikonsepsikan sebagai terdiri dari beberapa kelas atas dari beberapa tata-produksi yang kurang dominan. Kelas menengah *bukan* suatu kelompok sosial yang berada di antara kelas atas dan kelas bawah dalam satu tata-produksi.

Di antara sejumlah kelas-menengah (dari berbagai tata-produksi kurang dominan) itu, yang terpenting bagi perubahan sosial adalah kelas menengah dari tata-produksi yang semakin lama semakin kokoh karena didukung oleh kekuatan produksi yang semakin lama semakin kuat. Dalam kebanyakan masyarakat kapitalistik mutakhir, kelompok ini diidentifikasi sebagai kaum terpelajar kota yang bergelar, bekerja sebagai profesional, manager, ahli, atau tokoh-tokoh intelektual yang tak terikat dalam suatu lembaga formal atau lembaga berkiblat-laba. Mereka merupakan kelas atas dalam tata-produksi yang "belum" dominan, yang beroperasi produktif dengan mengandalkan pengetahuan mutakhir dan ketrampilan canggih. Modal atau aset eksplorasi mereka yang utama dalam kajian para sarjana dua dekade terakhir disebut dengan julukan-julukan seperti modal budaya, modal manusiawi, modal simbolik atau aset organisasional. Semua julukan ini dimaksudkan untuk membedakan mereka dari pengertian "modal-uang" yang dianggap menjadi salah satu aset utama da-

lam kapitalisme yang selama ini kita kenal dan kini dijuluki "kapitalisme-uang" (*moneyed-capitalism*).

Dengan pemetaan seperti itu, kita *tidak* akan mencari kelas menengah berdasarkan jumlah gaji, harta atau tingkat dan pola konsumsi yang diperkirakan berada di tengah-tengah kelompok lain yang serba berlebih (kelas atas) dan mereka yang serba berkekuatan (kelas bawah). Kelas menengah bukanlah kapitalis kecil atau proletariat besar. Pemetaan sebastak tadi juga memungkinkan kita melakukan analisa empiris dengan wawasan historis yang dinamis. Kelas menengah tidak didefinisikan secara universal dengan kategori ahistoris berupa jenis pekerjaan (manual atau non-manual, misalnya), tingkat pendapatan atau gaya hidup, tapi dalam hubungan-sosial (antar kelas dan antar tata-produksi) yang spesifik dan tidak statis dalam sejarah.

Kaum borjuis Eropa di abad ke-11 sering diakui sebagai generasi pertama kelas menengah. Mereka juga disebut *kelas menengah lama* untuk dibedakan dari *kelas menengah baru* yakni kaum profesional, intelektual serta manajer. Sebagai kelas menengah lama, kaum borjuis itu *bukanlah* tuan-tanah atau bangsawan dengan pemilikan tanah atau wewenang kebangsawanan "menengah". Juga bukan budak dengan pangkat lebih tinggi daripada kebanyakan budak lain. Kedudukan mereka bukanlah di antara kelas atas dan kelas bawah. Tapi berada di samping atau di luar hubungan eksploratif dua kelas utama pada masa itu. Cita-cita resmi kaum borjuis lama ini bukanlah menempati posisi bangsawan atau tuan-tanah, menggantikan yang tengah berkuasa. Mereka bukan saja anti bangsawan yang sedang berkuasa, tapi juga anti pranata kekratonan dan perbudakan! Mereka berjuang, dan berkat revolusi kapitalisme ternyata berhasil naik kelas atas dalam tata produksi yang baru.

Agaknya karena borjuis dalam tata masyarakat feudal aristokratik pernah menjadi kelas-menengah di Eropa, banyak pengamat masa kini menyamakan kelas menengah sebagai borjuasi. Hal yang sama terjadi dalam kajian tentang Indonesia. Praktek ini tidak dapat sepenuhnya disalahkan, selama dipakai asumsi dasar bahwa tata-produksi kapitalisme bukanlah tata-produksi yang dominan dalam tata sosial Indonesia. Benar atau tidaknya asumsi demikian membutuhkan kajian dan perdebatan tersendiri yang tak mudah dipecahkan. Tapi mungkin persoalan utamanya bukan di situ, tetapi pada kerancuan konseptual si pengamat sendiri da-

lam memahami apa itu "kapitalisme".

Tidak adanya borjuasi (menurut definisi yang sudah baku dan beku) yang cukup kokoh di Indonesia sering dijadikan dasar kesimpulan tidak adanya kelas menengah. Atau dikatakan tidak ada kelas menengah yang "sejati", seperti halnya kapitalisme Indonesia dianggap kurang "sejati". Kalaupun borjuasi sebagai kelas menengah itu dianggap ada, para pengamat ini kerepotan mencari kelas atasnya karena mereka mengabaikan kemajemukan tata-produksi. Mereka mungkin juga mengabaikan sejarah sosial Indonesia mutakhir di tengah gelombang sistem dunia yang telah mengubah kedudukan dan wajah kelas kaum burjuis maupun pranata kapitalisme secara keseluruhan.

Di negara-negara pusat kapitalisme dunia, burjuasi itu telah menduduki kelas atas dalam poros modal-buruh. Menurut Wallerstein mereka bahkan sedang sibuk meng-aristokrasi-kan diri. Di negara-negara pinggiran bertumbuh kelas atas lewat poros birokrasi negara (seringkali militeristik) - rakyat sipil. Wallerstein menggaris-bawahi ucapan Fanon tentang *dictatorship of the bourgeoisie*, plesetan untuk slogan *dictatorship of the proletariat* dari Marxisme. Perlu diingat, militer yang menguasai negara Orde Baru, sebelumnya sudah menguasai perusahaan-perusahaan nasional besar. Para ahli mungkin tidak menganggap mereka sebagai "borjuasi sejati". Keangkuhan dogmatis mendorong para sarjana kita menciptakan istilah-istilah seperti "kapitalisme semu" atau "kelas menengah bukan dalam pengertian sebenarnya". Apabila konsep ilmiah tak cocok dengan realitas, patut dipertanyakan yang "semu" itu keilmianahan konsepnya atau realitas historis yang dikaji?

Jika kerangka pemikiran seperti di atas dapat diterima, kita tidak menghadapi kesulitan dan kebingungan seperti yang menimpa sejumlah penulis di buku ini. Daniel Lev, William Liddle, atau Howard Dick merasa mampu membedakan dengan mudah kelas menengah dari kelas bawah, tapi sulit membedakan kelas menengah dan atas. Mereka, seperti banyak pembahas di Indonesia, mencari kelas menengah di antara elite dan rakyat jelata. Robison sibuk membedakan kelas atas dan menengah, hingga kelas bawahnya lenyap.

Seandainya kerangka pemikiran di atas dapat diterima, kita tak perlu memaksakan penyusunan atau menumpangkan kelas menengah di antara salah satu dari dua kelas dalam struktur ka-

pitalisme. Tak perlu membujuk kaum Marxis untuk menambah jumlah kelas sosial dari dua menjadi tiga (atas-tengah-bawah) atau lebih, seperti yang dikerjakan kaum Weberian. Kita hanya meminta perhatian mereka tentang majemuknya struktur kelas dalam setiap masyarakat kontemporer, termasuk Indonesia.

Untuk banyak masyarakat pinggiran seperti Indonesia permintaan seperti itu lebih mendesak karena proses produksi kapitalisme-uang seringkali bersaing dan sesekali bekerja-sama dengan kekuatan modal dalam bentuk birokrasi negara, patronase primordial atau bahkan kekuatan teror dan kekerasan. Tapi ini tidak berarti kapitalisme Indonesia kurang "sejati" daripada kapitalisme yang lain. Keahlian, ijazah serta modal-budaya lain merupakan modal dan alat produksi yang semakin lama semakin penting dan menjadi dasar kekuatan kelas-menengah. Semua itu bukan sekedar sebagai konsumsi atau gengsi bergaya hidup!

Dalam kaitan ini sumbangan Ken Young dan Aswab Mahasin terasa penting sekali. Mereka memahami kemajemukan itu. Sebagian besar dari penulis dalam buku ini membayangkan masyarakat Indonesia berstruktur tunggal. Reduksi kemajemukan struktur sosial itu juga tampak pada mereka (misalnya William Liddle dan Jamie Mackie) yang menolak mentah-mentah uraian Robison yang melihat Indonesia sebagai masyarakat kapitalistik-uang, dan merasa lebih benar melihat Indonesia ini sebagai masyarakat patrimonial. Mungkin reduksionisme seperti ini tak terjadi seandainya kita punya peta struktur kelas sosial Indonesia yang memadai dan tidak mengabaikan kemajemukan struktur kelas sosial, interaksi antara berbagai struktur itu, dan kemajemukan segmen dalam masing-masing kelas itu sendiri. Dalam kerumitan peta tata-produksi yang majemuk seperti itu, saya duga persoalan miltiter, etnis, agama, dan gender mendapat tempat walau secara selektif dan makro. Jelas membuat peta serumit itu tak mudah.

Harapan akan peta seperti itu mungkin agak berlebihan jika diingat bahwa pendalaman teori belum mendapat perhatian dan pelembagaan selayaknya dalam tradisi keilmuan kita. Apalagi menyangkut teori kelas, khususnya yang berwawasan Marxis. Kumpulan tulisan dalam buku ini memberikan sekelumit petunjuk patologi akademik kita. Berikut ini kita akan mempertimbangkan sumbangan Jamie Mackie dan Howard Dick, dua sarjana yang dalam buku ini paling gencar bersilang-kata dengan Richard Robison. Mackie memberikan banyak sumbangan yang penting dalam tu-

lisannya, walau tanpa mengandalkan sebuah konsep atau kerangka teori. Sayang, tulisannya tercemar nafsu mengecam uraian Robison; kecaman yang bukan saja tak perlu bagi susunan tulisannya sendiri, tapi juga tak mengena sasaran pada uraian Robison. Serangan Mackie bermuara pada sebuah label. Seakan-akan kesalahan Robison ialah karena ia menganut teori Marxis. Tapi sejauh mana cap yang diberikan Mackie itu tepat, apa yang dimaksud Mackie dengan Marxis, Marxis seperti apakah yang dianut Robison, apa yang salah dari semua Marxis atau khusus yang dianut Robison? Sayang semua ini tak dijelaskan Mackie. Yang banyak diserang Mackie adalah sebuah gambaran kultural tentang Marxisme.

Bagi sarjana seperti Howard Dick ketidakjelasan pemetaan struktur sosial itu tidak apa-apa, seperti diakuinya dalam buku ini. Seperti kebanyakan pengikut Weberian, ia membahas kelas menengah sebagai benda yang bisa menarik untuk diteliti dalam dirinya sendiri sebagai salah satu dari banyak kelas sosial. Berbeda dari kaum Weberian, bagi kaum Marxis perbedaan kelas tidak saja menunjukkan *perbedaan kepentingan*, tetapi *pertentangan kepentingan*. Hubungan antar kelas, seperti dijelaskan Wright, bukan saja menunjukkan dominasi (yang satu lebih kuat dari yang lain), tapi eksplorasi (yang satu bisa kuat selama masih bisa menghisap yang lemah). Karena itu sebuah kelas tak bisa dibahas terlepas dari kaitannya dengan kelas lain.

Dick mengunggulkan analisa nilai-nilai dalam pembahasan kelas menengah. Jika ia berhasil meyakinkan pembacanya, si pembaca bisa bertanya apakah pilihan metodologisnya sendiri bebas nilai? Dengan demikian juga bebas kepentingan kelas? Tuduhan begitu mungkin tidak adil, juga tak tepat. Jika perbedaan kerangka teori berkorelasi langsung dengan keberpihakan ideologis, mengapa sesama kelas menengah seperti Dick atau Mackie bisa sangat berbeda dari Robison? Ini membawa kita pada dua tema berikut, yakni persoalan politik, ideologi dan gaya hidup kelas menengah; serta persoalan kekuasaan dalam pembahasan ilmiah para sarjana.

Politik, Ideologi, Gaya Hidup

Satu persoalan konseptual dan teoretis lagi perlu digarap untuk membicarakan politik, ideologi dan gaya hidup kelas menengah. Sejauh mana dan berdasarkan alasan apa kita boleh bertoleransi ter-

hadap keanekaragaman corak politik, ideologi atau gaya hidup sebuah kelas sosial yang disebut kelas menengah? Kita tahu, tak ada kelas sosial yang seragam. Hanya dalam abstraksi, secara garis besar dan dalam situasi ekstrem ada kelas sosial yang mungkin bisa mempunyai keseragaman yang cukup tinggi. Dua pendekatan Wright berikut ini bisa dipertimbangkan.

Pertama, untuk memahami politik, ideologi, atau gaya hidup kelas menengah, kita layak menengok sumber dasarnya pada *kepentingan material* kelas ini, yang pada gilirannya dibatasi (walau tak sepenuhnya ditentukan) oleh *kedudukan kelas* ini dalam struktur kelas sosial secara umum, yang terbentuk akibat proses dan hubungan sosial dalam produksi dan reproduksi masyarakat itu. Sudah disinggung, tak mudah menggambarkan peta struktur kelas suatu masyarakat. Celakanya lagi, sekalipun diandaikan kita mampu memetakan struktur ini, dapat dipastikan masih akan banyak kekaburuan, bahkan pertentangan empiris. Struktur masyarakat tidak tunggal selain tidak statis. Berbagai perbenturan antar struktur, antara kepentingan (jangka-pendek dan jangka-panjang) dan antara kedudukan kelas dalam struktur menyebabkan kebingungan subyektif, penundaan strategis, penyumbatan dan kompromi taktis kepentingan material. Maka beraneka-ragamlah pilihan politik atau gaya-hidup kelompok sosial dan individu dalam masing-masing kelompok dalam satu kelas pada suatu situasi atau pada masa yang berbeda-beda.

Mereka yang mempunyai kedudukan kelas sama tidak selalu dan tidak dalam semua hal bertingkah seragam. Sebaliknya mereka yang makan dengan menu sama, berjumlah gaji sama, atau menonton pentas seni yang sama belum tentu menduduki tempat kelas dan struktur produksi yang sama. Jadi masihkah ada gunanya menggambar struktur kelas? Ya, sebab di balik semua perbedaan empiris itu ada batas-batas rentang variasi yang struktural. Dan di atas semua kesulitan metodologis ini kita dapat mengenali tekanan dan peluang struktural yang sama bagi mereka yang berkedudukan kelas sama untuk meningkatkan kepentingan material mereka (walau bergaji lain, atau berselera busana lain).

Walau agak kuno dan sering disalah-pahami, cara berpikir bapak strukturalisme Ferdinand de Saussure tentang bahasa layak dikemukakan di sini. Walau hidup dalam satu komunitas berbahasa yang sama, setiap orang berbicara dengan mengucapkan kalimat, gaya bicara, nada-suara, juga logat yang berbeda-beda.

Berbeda dari kumpulan binatang. Di tengah samudra perbedaan berbicara itu toh mereka boleh dibilang berbicara dalam bahasa yang sama dan bisa saling memahami. Mengapa? Di balik berbagai perbedaan itu ada struktur bahasa yang sama. Bukan berarti struktur adalah segala-galanya dalam berbahasa. Bukan juga berarti struktur itu statis dan tak bisa berubah. Apa yang membentuk struktur? Seperangkat unsur yang saling berkaitan dan sekaligus menempati kedudukan saling membedakan dalam seluruh bangunan keterkaitan mereka. Sebuah unsur hanya bermakna dalam bahasa (seperti kelas sosial dalam masyarakat) dalam kaitan dan perbedaan atau pertengangannya dengan unsur (atau kelas) lain.

Kedua, Wright mengingatkan, secara struktural berbagai kelompok yang biasa disebut kelas menengah mempunyai kedudukan kelas yang tidak persis sama. Maka ada sebutan kelas menengah sebagai kata benda jamak ("kelas-kelas menengah"). Tergantung pada kasus empiris tertentu, perbedaan mereka dapat juga disebut sub-kelas. Kaum manajer pada perusahaan swasta, misalnya, mempunyai kedudukan yang berbeda dari pegawai negeri, dan masih berbeda lagi dari seniman, pemuka agama atau perwira militer. Di antara mereka ini, manajer perusahaan paling pantas dibilang "kelas menengah" dalam pengertian terhimpit antara dua kelas utama dalam produksi kapitalisme: pemodal dan pekerja. Tapi kedudukan kelas manajer itu pun tidak terkatung-katung atau macet di antara kedua kelas itu, karena poros eksploitasi kapital-pekerja bukan satu-satunya lorong mobilitas yang ada dalam masyarakat. Manajer, juga kelompok lain dalam kategori umum kelas menengah, bisa terlibat dalam struktur eksploitasi yang tidak berporos produksi pemodal-pekerja.

Para kelas menengah ini telah mengenali basis kekuasaan baru, kepentingan material tersendiri, dan membayangkan sebuah struktur produksi baru yang mengandalkan kemampuan organisatoris (manajer), pengetahuan, ijazah, informasi, wacana, dan kewenangan (profesional dan intelektual), atau politik-birokrasi (pejabat negeri) sebagai aset utama.

Politik kelas menengah, seperti politik kelas yang lain, pada hakikatnya berpihak pertama-tama dan terutama kepada kepentingan material mereka sendiri. Ideologi dan corak politiknya bukan penjilat kekuasaan kelas atas atau berkorban demi kesejahteraan kaum tertindas di kelas bawah. Itu pada dasarnya, yang pertama-

tama dan utama sebagai prinsip, sebagai batasan struktural. Dalam kegiatan sehari-harinya, dari masa ke masa, dari individu dan kelompok yang satu ke yang lain kita jumpai aneka corak penampilan dan perilaku. Mereka kadang-kadang bisa tampil sebagai oportunis politik atau ekonomi, penjilat, plin-plan, atau pejuang hak-hak asasi dan tertib hukum, atau bahkan aktivis radikal. Di Indonesia banyak yang berilusi tentang kelas menengah (lama atau baru) seperti di Barat yang berwatak progresif. Omong kosong begini digunakan untuk mengolok-olok konservatisme kelas menengah Indonesia. Padahal, seperti dikatakan Gouldner dan sejumlah penulis lain, borjuis Eropa adalah penjilat kelas atas sebelum mereka mampu menggulingkan kekuasaan tersebut.

Sumbangan Daniel Lev dalam buku ini layak dihargai. Dialah pemikir di buku ini yang paling menonjol dalam upaya simpatiknya melacak dan memahami pertumbuhan salah satu segmen terpenting (kaum profesional) dalam kelas menengah Indonesia. Ia menyadari fragmentasi dan majemuknya kelas menengah di Indonesia yang disebutnya "kelompok-kelompok menengah", atau "golongan-golongan menengah". Ia menghindari istilah "kelas", karena istilah ini dianggapnya terlalu merepotkan. Dengan canggih dan cermat ia memperhitungkan berbagai sisi yang serba tidak pasti dan campur-aduk dalam sejarah hubungan kelompok ini dengan negara. Dengan memusatkan perhatiannya hanya pada kelompok profesional, ia menghindari generalisasi berlebihan yang telah banyak menyesatkan orang. Walau Lev ragu menyebutnya sebagai "kelas" dan tidak berambisi mengembangkan sebuah analisa kelas, kekayaan data dan kerangka uraiannya (terutama mengenai ideologi kelompok profesional) merupakan sumbangan yang penting bagi upaya konstruksi teori lebih lanjut. Kalau ada yang perlu diwaspadai dari uraian menawan Lev ialah bahaya terjemurus terlalu jauh dalam empatinya yang besar pada kelompok yang dibahasnya. Mungkin karena Lev punya hubungan pribadi yang terlalu dekat dengan mereka yang dibahasnya. Walau sudah menjaga jarak, Lev punya kecenderungan tergoda berpihak pada kepentingan kelompok ini.

Lev agak unik dalam buku ini karena kebanyakan penyumbang tulisan mencemooh konservatisme perilaku kelas menengah di Indonesia. Tapi ketika mencoba merumuskan apa hakekat konservatisme ini dan apa sebabnya ia bertumbuh, ada banyak yang layak diperdebatkan. Kebanyakan para penyumbang buku ini, termasuk-

Robison, tidak mencari jawabnya dengan analisa kelas atau mengaitkannya dengan kepentingan material yang bersifat struktural. Mereka juga tidak mempertimbangkan rincian kondisi kesejarahan yang membuka peluang atau menindas peluang bagi kelas menengah ini untuk mengoptimalkan kepentingan mereka sesuai dengan keunggulan komparatif (aset eksplotasi) yang mereka miliki masing-masing.

Robison menggabungkan kaum pejabat, manajer, profesional dan intelektual dalam satu kategori besar kelas menengah. Walau ia merasa ada perbedaan yang penting di antara mereka, ia ragu-ragu menangani perbedaan ini secara serius. Memilih jalan yang gampang, Robison menempatkan semua kelompok itu ke dalam satu kategori fungsionalis yang sama, yakni sebagai kaki-tangan kapitalis. Seakan-akan mereka tak punya kepentingan kelas tersendiri, walau kepentingan itu mungkin *untuk sementara* dan *untuk sebagian* dapat terpuaskan dalam status-quo Indonesia. Penyederhanaan itu sangat merugikan, karena kolaborasi dan pertentangan antar sub-kelas menengah di Indonesia agaknya merupakan bagian terpenting dari dinamika politik, reproduksi dan perubahan sosial. Dengan demikian reduksionisme ekonomis Robison tak memungkinkan penjelasan serius tentang gejala radikalisme di kalangan kelas menengah.

Walau bertentangan dengan Robison dalam beberapa hal lain, pemikir seperti Jamie Mackie dan William Liddle juga tak bisa membayangkan bahwa di Indonesia ada yang dapat disebut kelas menengah dengan kepentingan kelas tersendiri. Berbeda dari fungsionalisme Robison, Mackie dan Liddle menggambarkan konservatisme politik kelas menengah di Indonesia secara esensialis. Seakan-akan konservatisme itu sudah "dari sononya" menjadi jati-diri, watak, kepribadian, nilai budaya atau kebudayaan Indonesia. Seakan-akan masyarakat ini memang secara esensial dengan suka-cita menerima tata politik yang otoriter dan tata ekonomi yang pincang .

Di kalangan sarjana asing tak sedikit yang berpandangan seperti kedua mahaguru ini. Pandangan seperti ini harus menyangkal atau mengabaikan berbagai pranata koersif, tindakan kekerasan dan trauma-menyejarah yang bertanggung-jawab terhadap kondisi dan penampilan luar masyarakat Indonesia; kondisi mana dapat berlangsung berkat hubungan internasional, termasuk dukungan dari pemerintah dan komunitas intelektual dari masya-

rakat para mahaguru itu berasal. Pandangan di atas juga harus menelan mentah-mentah propaganda yang menyebutkan bahwa di Barat demokrasi lebih dihormati, kapitalisme lebih rasional dan setia pada hukum pasar-bebas. Dengan pandangan itu, Mackie dan Liddle mengecam sarjana non-Indonesia yang mencoba mengerti dengan empati seluk-beluk kesulitan, pergulatan, dan kepentingan tersamar rekan-rekannya di Indonesia. Mereka dikecam sebagai orang-orang asing yang tak paham realitas Indonesia dan bersikap etnosentrik dengan memaksakan kerangka berpikir Barat. Kontradiksi pandangan itu tak terelakkan. Seakan-akan yang bisa mengerti realitas Indonesia adalah, jika bukan hanyalah, para pengajur teori "keunikan" Indonesia yang dalam kata-kata Halim HD, "tampil lebih Orde Baru daripada Orde Baru". Seakan-akan kecaman seperti itu sendiri bukan sebentuk etnosentrisme, bukan penghinaan pada orang Indonesia, bukan sebentuk orientalisme klasik yang setua kolonialisme Eropa awal.

Keresahan sosial di Indonesia memang tak selalu diperhatikan dan tak ingin diperhatikan forum resmi di dalam maupun luar negeri yang berkepentingan mempertahankan status-quo Indonesia. Keresahan itu jarang terungkap dengan hiruk-pikuk seperti dalam etalase demokrasi Barat. Tetapi karena tidak seperti di Barat, apakah dengan sendirinya mereka ini "unik"? Atau menjadi bukti bahwa masyarakat Indonesia memuliakan dan menikmati kediktatoran? Tanter dan Young mengingatkan perlunya memperluas pembahasan kelas menengah Indonesia dalam jaringan ekonomi global dan *rentier-militarist state*. Seorang peneliti -- juga yang asing -- tak bisa sepenuhnya netral dalam menjalankan kegiatan ilmiahnya. Soal ini menghantar kita ke tema terakhir, yakni persoalan hubungan kekuasaan dan politik para ilmuwan dalam perbincangan tentang kelas menengah di Indonesia.

Kekuasaan, Bahasa dan Pengetahuan

Hubungan kekuasaan dalam setiap produksi pengetahuan dan praktik berbahasa tentunya telah cukup dikenal para pembaca buku ini. Hubungan itu mengajak kita memeriksa politik dan tindak kekuasaan seorang pembahas ketika ia berbicara tentang orang lain, misalnya tentang politik kelas menengah di Indonesia.

Sekali lagi dalam soal ini saya terkesan oleh kepekaan seorang pemikir matang seperti Daniel Lev dalam menyusun uraiannya.

Sebaliknya, saya sangat terkejut membaca tulisan Howard Dick.

Dalam naskah aslinya ia membuka tulisannya dengan kata-kata: "The Indonesian middle class has been discovered." Tak ada nada ironi atau berkelakar di sini. Ia membayangkan kelas menengah di Indonesia sebagai benda yang dibikin oleh kekuatan dari luar. "At the Monash conference ...", lanjutnya dalam kali mat kedua. Sikap yang kedengarannya orientalis begini lebih dipertegas lagi masih di alinea pertama tulisannya:

"An analogy may be drawn with European knowledge of Australia in the eighteenth century. Cartographers recognised the existence of Terra Australis, and parts of the coast had even been charted. Whether it was one continent or several large islands, however, and the nature of its topography, climate and habitation were matters that could be argued according to prejudice and imagination."

Saya tak berkesempatan membaca terjemahan kalimat-kalimat itu dalam buku ini. Tapi saya menduga pesan utama penulis ini tetap jelas. Menurut Dick eksistensi kelas menengah di Indonesia berada dalam genggaman para ahli yang menguasai pengetahuan. Eksistensi kelas itu baru sah bila sudah dilirik dan diakui para penguasa berpengetahuan Eropa. Hubungan antara si peneliti dengan kaum yang diteliti dibandingkan Dick tanpa ironi dengan sejarah brutal bangsa pendatang berkulit putih yang merasa berhak merampas dan secara sistematik menindas penduduk Aborigen. Ia mempersetankan apa pengetahuan atau pendapat si penduduk asli tentang dirinya sendiri sebagai objek kekuasaan dan pengetahuan si pengamat luar. Nasib selanjutnya si objek bergantung dari prasangka dan imajinasi si penguasa yang berilmu.

Berkali-kali saya bertanya pada diri sendiri apakah saya salah paham membaca kalimat-kalimat itu. Apalagi jika ditulis sarjana yang mengunggulkan dan menganjurkan pentingnya kepekaan dan penghargaan pada nilai-nilai budaya di atas struktur politik-ekonomi. Di sini kita tidak mempersoalkan kebangsaan si pembahas atau pihak yang dibahasnya. Kita mempersoalkan hubungan kekuasaan, pengetahuan, dan pembahasan ilmiah. Saya tak ingin membesar-besarkan soal ini yang sebenarnya tidak menjadi pokok persoalan utama pada ulasan Dick. Jika alinea pembukaan tulisannya dibuang, uraian Dick mungkin tak kehilangan apa-apa.

Seperti saya sebut terdahulu, apa yang remeh bagi seorang

penyumbang buku ini bisa menjadi penting jika ditempatkan dalam bahasan lain. Selama mengikuti pembahasan para penulis seperti Dick, Robison, Liddle atau Mackie, saya bertanya-tanya dalam hati. Apakah mereka sadar akan kedudukan kelas mereka sendiri, ideologi mereka, dan sikap politik mereka dalam struktur kelas di lingkungan masyarakat terdekat mereka masing-masing di saat memberikan penilaian terhadap ideologi dan perilaku politik kelas menengah di Indonesia.

Jika Robison melihat "fungsi" kelas menengah di Indonesia sekadar sebagai petugas politik-ekonomi-ideologi kapitalisme, apakah yang dikatakannya tentang "fungsi" kelas menengah di Australia, di mana dia sendiri menjadi bagian? Jika Mackie atau Liddle betul-betul percaya ada esensi politik dan ideologi kelas menengah di Indonesia yang begitu konservatif, apa yang mereka akan katakan tentang politik dan ideologi kelas mereka sendiri di masyarakat terdekat mereka? Apakah jawabnya sudah tersirat dalam pembahasan mereka tentang orang lain? Apakah para pembahas ini mempertimbangkan (walau tak mengungkapkan eksplisit) kaitan antara sikap politik dan ideologi kelas menengah di Indonesia dan di negara-negara lain? Antara yang membentuk jalan berpikir para pembahas dengan pihak yang dibahas?

Di awal tulisan ini saya membandingkan perbincangan kelas menengah dan nasion. Yang tampil adalah paralelisme. Mungkin di penghujung catatan ini kita perlu membayangkan perbandingan itu dalam kesinambungan ketimbang paralelisme.

Dengan bahasan tentang "nasion", terpelajar pribumi di Hindia Belanda telah memobilisir perjuangan khalayak dan menghimpun legitimasi bagi sebuah perjuangan "kemerdekaan" dengan mengatas-namakan kepentingan seluruh rakyat jajahan. Bukan kepentingan kelas para terpelajar itu sendiri yang satu abad kemudian bernama kelas menengah. Dulu ketika kaum borjuis memimpin revolusi untuk menggulingkan kekuasaan monarki, mereka memobilisir massa dan meneriakkan slogan *liberte* (kemerdekaan), *egalite* (persamaan derajat) dan *fraternite* (persaudaraan bergender pria!). Mereka tidak meneriakkan "hidup kapitalis" atau "viva borjuis". Mungkin bukan karena mereka secara licik dan sengaja membohongi massa. Mungkin ini yang disebut ideologi yang harus membohongi pemeluk yang diuntungkan sendiri sebelum bisa membohongi pihak lain.

Kini, setengah abad setelah kekuatan penjajahan asing yang

lama dilumpuhkan, apakah janji-janji kemerdekaan nasionalisme masih dihormati kalau pun belum sepenuhnya tercapai seperti dicita-citakan? Apakah kedaulatan dan kesejahteraan nasional dalam praktek masih ditegakkan di atas kepentingan lain dalam hubungan penjajahan internasional baru? Sejauh mana struktur sosial Indonesia merdeka berbeda dari struktur sosial tanah jajahan Hindia Belanda? Adakah pemerataan, kemerdekaan dan persaudaraan (biarpun eksklusif di kalangan pria belaka) dalam mengecap buah yang telah diberikan oleh kemerdekaan nasional?

Kini tak ada penjajah asing yang secara mencolok bisa ditunjuk dan dijadikan musuh bersama. Kini retorika nasionalisme telah direbut dari kaum revolusioner oleh para manajer kene-garaan yang lebih gemar berbincang tentang stabilitas versus an-caman dari ekstrem kiri dan ekstrem kanan. Propaganda nasi-onalistik dibekuk dan dikerahkan menjadi sikap *xenophobic*, lebih *state-oriented* ketimbang *nation-oriented*. Apa yang tersisa untuk dikatakan kelas menengah terpelajar kota Indonesia? Apakah pem-bangunan, keterbukaan, profesionalisme, demokratisasi, hak asasi, *rule of law*, feminisme, lingkungan hidup atau globalisasi bukan bahan baru untuk memperbaharui legitimasi, mobilisasi massa dan propaganda mutakhir bagi sebuah perjuangan yang belum selesai gara-gara terhambat oleh monopoli, kapitalisme-rentier, bi-rokratisme, seksisme, patrimonialisme, primordialisme, korupsi, fasisme atau militerisme dari sub-sub-kelas yang lain?

Dalam situasi ini tidakkah "kelas menengah" menjadi topik yang memikat, sejauh diperbincangkan terlepas dari kaitan eks-ploitatif dengan kelas manapun yang lain? Jika cuma ini yang terjadi bukankah ini khas dalam tradisi mendongeng mitos ten-tang ratu adil yang tidak pernah datang dan membebaskan semua umat? Khas juga bahwa dalam dongeng itu si pahlawan tidak pernah dijelaskan sosoknya serta sejarah asal-usulnya. Tapi me-ngapa harus dijelaskan jika mitos merupakan ideologi yang dibu-tuhkan pertama-tama untuk membohongi diri sendiri demi stabi-litas, ketenteraman kejiwaan kolektif, selain kepentingan material?